

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dijelaskan pembahasan tentang “*Peranan Ahmad Husein Dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia Tahun 1958-1961*” pada bab-bab sebelumnya, maka akhirnya dibuat Kesimpulan sebagai berikut:

1. Ahmad Husein adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan pemimpin militer PRRI. Husein dilahirkan pada tanggal 1 April 1925. Ahmad Hussein mengenyam pendidikan sekolah di HIS (Hollandsche Inlandsche School) dan MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) milik Taman Siswa. Ayahnya yang bernama Kahar Mak Uncu bekerja di rumah sakit KNIL di Padang sebagai asisten apoteker, dan salah seorang tokoh Muhammadiyah Padang. Sejak kecil, Ahmad Husein aktif di Hizbul Wathan, organisasi kepanduan Muhammadiyah. Pada tanggal 15 Februari 1958 di Padang Ahmad Husein membentuk Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di bawah pimpinan Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri dengan tujuan mengoreksi pemerintahan otoriter Soekarno yang dianggap inkonstitusional dan mengabaikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Tindakan koreksinya itu ternyata mendapat sambutan berupa

aksi militer dari pemerintah pusat di Jakarta sehingga menimbulkan perang saudara di Sumatra Barat.

2. Berdirinya PRRI dilatarbelakangi kekecewaan para pemimpin militer dan sipil Sumatra Tengah terhadap pemerintah pusat yang cenderung sentralis, sehingga menimbulkan berbagai ketimpangan dalam pembangunan, terutama pada daerah-daerah di luar pulau Jawa. Sejumlah warga dan tokoh menuntut adanya otonomi daerah desentralisasi. Tuntutan tersebut muncul pada acara reuni Divisi Banteng di Padang pada tanggal 20–25 November 1956. Dihadiri oleh 612 veteran, reuni menghasilkan kesepakatan yang disebut Piagam Banteng. Dalam menghadapi berbagai pergolakan daerah, Presiden Soekarno semula masih mengutamakan diplomasi. Perdana Menteri Djuanda mengusulkan digelarnya Musyawarah Nasional (Munas) pada 10–14 September 1957 di Jakarta. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Abdul Haris Nasution mengusulkan masalah di daerah dengan penggunaan kekerasan. Namun, usaha Nasution tersebut tidak berhasil dan Presiden Soekarno menyetujui pelaksanaan Munas. Nasution menyiasati pelaksanaan Munas tidak mengarah pada masalah yang mengancam posisinya. Ia mengadakan larangan pertemuan komandan-komandan militer tanpa seizin KSAD.
3. Setelah pembentukan Dewan Banteng pada tanggal 20 Desember 1956, Letkol Ahmad Husein kemudian merebut kekuasaan Pemerintah Daerah dari Gubernur Ruslan

Muljohardjo. Dengan dalih gubernur yang ditunjuk pemerintah tidak berhasil menjalankan pembangunan daerah, Letkol Ahmad Husein kemudian mencetuskan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada 15 Februari 1958. PRRI kemudian mengajukan tiga tuntutan kepada pemerintah pusat, yaitu: dibubarkannya kabinet Djuanda, Mohammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX membentuk pemerintahan sementara sampai pemilihan umum berikutnya akan dilaksanakan Soekarno kembali pada posisi konstitusionalnya. Tuntutan lain yang juga diajukan oleh PRRI juga terkait dengan masalah otonomi daerah karena pemerintah pusat dianggap tidak adil kepada para warga sipil dan militer soal pemerataan dana pembangunan. Pemerintah menganggap pemberontakan PRRI harus segera dituntaskan dengan melakukan operasi gabungan yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Angkatan Perang RI (APRI). Tentara APRI melayangkan berbagai macam tindak kekerasan, bahkan ribuan orang juga ditangkap dengan cara paksa karena dicurigai sebagai simpatisan PRRI.

B. Saran-Saran

Penulis sadar sepenuhnya bahwa kesalahan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan terdapat dalam penulisan skripsi ini. Sehubungan dengan penelitian *Peranan Ahmad Husein Dalam Pemerintahan*

Revolusioner Republik Indonesia Tahun 1958-1961, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Dengan adanya skripsi ini, penulis berharap banyak orang-orang yang lebih mengetahui tentang peristiwa pemberontakan PRRI khususnya Ahmad Husein sebagai sosok yang memprakarsai berdirinya PRRI.
2. Bagi mahasiswa Sejarah Peradaban Islam perlunya dibuat jurnal ilmiah tentang biografi tokoh-tokoh pejuang yang berasal dari luar Banten kepada mahasiswa UIN SMH Banten, yang dikelola dan diterbitkan oleh pihak Jurusan Sejarah Peradaban Islam.
3. Bagi mahasiswa ataupun mahasiswi UIN SMH Banten, dalam melakukan penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan tokoh yang akan dikaji, serta harus lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan baik.